

Keamanan Maritim dan Dirgantara Indonesia

Diantara *The Arc of Instability* Kawasan

Dr Connie Rahakundini Bakrie
Departemen Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Studies
Direktur Eksekutif Institute of Defense and Security Studies

Abstrak

Kepentingan strategis terkait akan selat selat yang dimiliki Indonesia akan meningkat secara dramatis dan tajam. Chokepoints yang dimiliki Indonesia juga akan mengalami peningkatan tinggi dan simultan dari pergerakan pasukan dan kegiatan militer asing baik pada wilayah perairan maupun ruang udaranya, selain juga bahwa chokepoints dapat menjadi fokus utama dalam pengembangan ISR (*intelligence, surveillance and reconnaissance*). Indonesia dapat secara agresif terus menerus menyatakan posisi non bloknya dan artinya menegakkan Manual San Remo 1994 tentang konflik bersenjata di laut yang melarang aktifitas perseteruan bersenjata di perairan negara netral. Dalam konteks Indonesia menghadapi perseteruan kedua gajah (AS dan China), adalah bagaimana strategi kebijakan politik luar negeri akan berimplikasi pada keamanan Indonesia dimasa mendatang, khususnya dalam penanganan *spill over* dari AS bersama aliansinya, untuk menghadapi kekuatan China dengan *Blue Water Navy* nya di 2050

Sesungguhnya, umat manusia hidup sudah lebih dari 4000 tahun, tetapi hanya 800 tahun kita semua terbebas dari perang. Seperti di hutan rimba, hukum '*survival of the fittest*' berlaku dalam peradaban manusia. Maka terkait hukum survabilitas ini, kekuatan negara ditetapkan sebagai kemampuan dan ketangguhan dalam membina, mengembangkan serta mempertahankan kehidupan politik suatu negara, dari segala potensi gangguan dan ancaman, baik pada waktu perang, maupun damai.

'Security' secara sederhana diartikan saat dimana sebuah negara sudah mampu mencapai kemampuan untuk meminimalisir ancaman yang diprediksikannya atau sudah mampu menangani resiko yang akan ditimbulkan jika negara tersebut melakukan atau tidak melakukan apa apa untuk menangani ancaman yang mendatanginya. Ancaman negara memiliki empat dimensi utama, yaitu; militer-non-militer, konvensional-non-konvensional, langsung-tidak langsung, dan eksternal-internal. Efektivitas kekuatan militer menjadi persoalan penting dalam membangun kekuatan negara, dimana hal ini akan terukur dari kekuatan *maximum combat power*, dengan mengerahkan seluruh sumber daya fisik maupun politik yang ada.

Pemikiran seperti ini dikategorikan dalam tradisi realisme. Itu karenanya, suatu negara harus memiliki kekuatan yang relatif lebih tinggi, dibandingkan dengan negara yang dianggap berpotensi dapat mengganggu kepentingan nasionalnya, karena tidak ada suatu negara pun yang dapat menjamin, bahwa negara lain, tidak akan menggunakan kapabilitas kekuatan militer, baik dengan negosiasi politik, diplomasi maupun perang, demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Geopolitik pada dasarnya menekankan aspek geografi sebagai ruang hidup, dimana ruang hidup adalah sumber daya, sumber daya adalah energi dan ekonomi, energi dan ekonomi adalah kekuatan. Oleh karenanya, letak geografi, teritori dan ruang hidup, dengan segala isinya, harus mampu dikuasai, bila perlu dengan kekerasan bersenjata.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat besar. Jika Jerman menetapkan diri sebagai "Jantung Tanah Eropa", maka Indonesia dapat meng klaim sebagai "Jantung Maritim Asia Tenggara". Dengan lebar dari sisi Timur ke Barat yang mencakup 13 persen dunia, memiliki 12 lautan yaitu laut Natuna, Jawa, Sulawesi, Flores, Banda, Aru, Arafuru, Maluku, Seram, Halmahera, Timor dan Sawu berikut lengkap dengan SLOC (Sea Lanes Of Communications) yang demikian strategis, telah menempatkan negeri ini dalam posisi geopolitik yang sangat menawan dan supra strategis.

Dalam perspektif geo politik dan geo strategi, media laut menjadi sangat vital untuk gelar kekuatan, pembangunan pangkalan militer, jalur kapal selam, dan kapal perang serta arena perebutan pengaruh kepentingan politik, pertahanan maupun ekonomi. Utamanya di 6 tahun dan 36 tahun kedepan (tahun 2020 dan 2050), dampak menawannya posisi geopolitik ini

akan menempatkan kita pada posisi ancaman geostrategy yang lebih krusial dibanding saat para pengelana kolonial memasuki perairan wilayah kita demi rempah rempah dahulu kala, dengan berpacunya negara *super power* (AS) dan negara negara kawasan menyikapi *Two Ocean Policy* dari China yang menariknya, berjalan searah bersama sama dengan Russia.

Nun jauh sebelum NKRI berdiri, para pemimpin Kerajaan Sriwijaya di abad ke 7 hingga 13 serta Kerajaan Majapahit di penghujung abad 12 hingga 15 telah membuktikan kemampuannya dalam menggunakan wilayah strategis perairan Indonesia dari sisi Geopolitik dan Geostrategi. 'Kesultanan' kecil seperti Kudus dapat begitu tegasnya memerintahkan 'juru bayar-nya' (Kementrian Keuangan dalam konteks Indonesia hari ini) untuk membangun armada laut sangat besar dengan 375 kapal kapal perang raksasa kelas "Jung Jawa" dalam kurun waktu 1 tahun saja (industri pertahanan maritim saat itu terletak di Semarang dan Bone), mempersenjatai dan mengerahkan armada kesultananannya (1000 personil setiap kapalnya).

Meski beliau kalah dan gugur karena penghianatan, semangat ini memicu seorang Ratu Kalinyamat di tahun 1550 mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari Bangsa Eropa. Armada Jepara ini kemudian bergabung dengan armada pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Cerita tentang Ratu Kalinyamat memang tidak berakhir dengan digelari *Duchesse* atau *Lord* dari Kerajaan Inggris Raya, tetapi namanya ditulis dalam sejarah Portugis dengan julukan yang menggetarkan hati : *Rainha de Jepara, Senora Pade Rosa se Rica*" (Ratu Jepara yang penuh kekuatan dan kekuasaan).

Berbicara tentang masa depan kawasan, menurut Andrew Forbes dari Sea Power Centre Australia, di tahun 2020 diestimasikan kawasan Asia akan ditempati oleh 56 % populasi dunia, akan menjadi kekuatan militer ke 6 diantara 10 kekuatan militer terbesar dunia, akan menjadi kekuatan ekonomi ke 3 diantara 4 kekuatan ekonomi terbesar dunia, akan menjadi pengguna energy ke 6 diantara 10 pengguna energy terbesar dunia. Hal ini juga sesuai dengan prediksi jauh hari dari Henry Kissinger yang menyampaikan bahwa masa depan kawasan Asia Pasifik akan terbagi dalam sebuah segitiga memetakan akan pertumbuhan ekonomi, perebutan sumber

daya dan pembangunan kekuatan militer untuk menghadapi kelangkaan energy yang dibutuhkan bagi terwujudnya pembangunan ekonomi negara.

Peningkatan nilai strategis kawasan Asia Pasifik sebenarnya sudah terlihat jelas pada 10 point “Strategi Raya AS Abad 21” dan bagaimana kemudian penyebaran kekuatan personil militer AS di seluruh dunia untuk mewujudkan strategi besarnya tersebut, dimana pada pada 2011 telah mencakup kekuatan personil sebesar 1.219.955 di wilayah AS sendiri, 80.718 personil di Eropa, 207.670 personil di Timur Tengah, 55.671 personil di Asia disusul dengan 1.165 personil di Karibia dan Amerika Selatan serta 160 personil di negara bekas jajahan Soviet.

Pernyataan Panetta di Shangrilla Dialogue yang terkenal sebagai “Reposisi Asia” untuk menggeser 60 persen kekuatan AS ke kawasan ini, yang kemudian disebutnya sebagai kawasan Indo Pasifik, memberikan gambaran bahwa sedang dan terus akan terjadi pergerakan pasukan dan kekuatan militer (udara dan laut) yang mencakup : *160.000 active duty personnel, 143 ships, 1.850 aircrafts , 6 aircraft carriers, 4 amphibious transport docks, 6 dock landing ships, 11 cruisers, 31 destroyers, 13 frigates dan 36 submarines serta 1 littoral combat ships*

Jelaslah, kembalinya kekuatan AS ke kawasan telah membuktikan nilai relatif strategy geopolitik yang mencakup rute udara, darat dan laut yang sedang berubah dramatik dan secara substansial blok kekuatan *Heartland Power* sedang bergeser pada *Maritime Power*. *Maritime Power* menjadi semakin berperan mengingat kandungan segenap SDA yang dimiliki laut kawasan dan isinya. Ini menjadikan seluruh sisi Samudera Pasifik dan Hindia kembali dilirik.

THE ARC OF INSTABILITY

The Arc of Instability kawasan jelas menjadi berbeda dengan lahirnya kekuatan militer China yang disambut dengan ketegasan AS untuk kembali berporos ke Asia Pasifik dengan menekankan pada penggelaran kekuatan maritim dan dirgantara AS ke kawasan dalam 8 tahun mendatang (2020). Strategi AS ini erat kaitannya dengan pengembangan militer China dalam “Strategi Dua Samudera” yang akan tergelar di 2020 dan 2050 serta ancaman sengketa maritim Laut Cina Selatan dan Timur yang diproyeksikan AS ke depan, selain sebagai strategi AS akan

pencapaian *Freedom of Navigation, Active Engagement Policy* dan memperluas zona kedalaman pertahanannya.

Seorang Mayor Jendral dari PLA, Gen Luo Yan menyatakan bahwa pembangunan kekuatan militer China ke Samudera Pasifik dan samudera India ini jelas untuk mengantisipasi kekuatan AS, sebagaimana disampaikannya : "...the so called forward presence means that way, United States can send its gun boats to every corner of the world... This way , the Unites States can even claim the Yellow Sea and the SCS is covered within its security boundary....".

Intervensi AS sebagai negara *super power* di kedua kawasan, tidak semata berkaitan dengan upaya untuk menghadapi potensi ancaman terkait geopolitik, tetapi juga terkait erat, pada perebutan sumber daya alam (SDA), sumber daya strategis (SDS), jalur jalur strategis militer, logistik militer serta perdagangan, juga ancaman terkait unsur 'ideologis'.

Jika reposisi AS kekawasan ini dikaitkan dengan 175 combined military excersise per tahun baik dengan latihan bersama *Cobra Gold, Carat, Sea Cat* dll dimana terhitung diikuti oleh pelibatan 250 kunjungan kapal perang per tahunnya ke kawasan, maka tidaklah heran karenanya, China meningkatkan terus anggaran pertahanannya.

Pada periode 2000 - 2010 lalu China telah sukses membangun kekuatan *Off Shore Defence* dengan berkonsentrasi pada *off shore combatant* dan *Brown Water Navy*. Di 2010 – 2020 mendatang China mencanangkan *Off Shore Operation* sepanjang *1st Island Chain* dan pembangunan *Green Water Navy* dengan pengembangan kapal besar permukaan, kapal selam nuklir dan pesawat tempur untuk kapal induknya. Dan di 2020 – 2050 China akan melakukan finalisasi program pesawat tempur dan pembangunan kekuatan *Blue Water Navy* yang mampu beroperasi di *2 high seas*.

Pada Juni 2012 China meluncurkan kemampuan perdananya dalam *deep water drilling platform* sementara lembaga penginderaan nasional China telah mengumumkan rencananya untuk memperbesar kekuatan dengan menambah 16 buah pesawat, 350 pesawat patroli di tahun depan (2015), dan bersamaan dengan itu meningkatkan jumlah staff dari 9000 menjadi 15.000 di tahun 2020, maka singkatnya, inilah pertama kalinya dalam sejarah China berdiri negara ini berterus terang dan demikian terbuka akan menjadi sebuah negara maritim yang mumpuni, baik secara ekonomi, diplomatik maupun militer.

Kekuatan militer China yang diarahkan pada' *core interest*' mencakup kesejahteraan zona litoral, ekonomi, dan nilai kebanggaan hegemonik sangatlah terkait erat dengan keamanan SLOC (*sea lanes of communications*) dan *chokepoints* yang selama ini keberadaannya menjadi sebuah link yang hilang dari issue stabilitas regional. Maka, konsekuensi apa yang akan diterima oleh Indonesia sebagai negara yang merupakan jantung maritim kawasan ini?

Jelaslah bahwa kepentingan strategis terkait akan selat selat yang dimiliki Indonesia akan meningkat secara dramatis dan tajam. Chokepoints yang dimiliki Indonesia juga akan mengalami peningkatan tinggi dan simultan dari pergerakan pasukan dan kegiatan militer asing baik pada wilayah perairan maupun ruang udaranya, selain juga bahwa chokepoints dapat menjadi fokus utama dalam pengembangan ISR (*intelligence, surveillance and reconnaissance*) dan dalam waktu perang choke points dapat menjadi semakin rentan terhadap kontrol lepas pantai lalu lintas kapal kapal perang kedua gajah yang saling "bersaing" ini.

Samuel Huntington dengan jelas menyatakan bahwa negara yang dapat menyeimbangkan kekuatan China di kawasan hanyalah Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, identitas kultural Indonesia yang pernah berdiri sebagai sebuah *independent maritime empire* dan kultur budaya Vietnam yang telah terbukti selama 5000 tahun unggul dari China, menjadikan kedua negara ini bersama India dan Jepang dapat memainkan peran penting dalam keseimbangan regional.

Posisi geografis berikut nilai SLOCs serta *chokepoints* seharusnya mampu menetapkan peta jalan Indonesia menuju keamanan samudera dan dirgantara yang jauh lebih utuh dan komprehensif. Perkembangan situasi keamanan kawasan ini menuntut Indonesia untuk mampu berfikir cepat, kreatif, dan mengetahui dengan jelas akan arah tujuan dalam merumuskan strategi pertahanan maritim dan udaranya. Artinya, mampu mengukur dengan jernih kemampuan yang sudah dan akan dimiliki berbanding apa yang harus dicapai dengan jujur.

Kaum idealis cenderung melihat politik internasional dengan pandangan idealistik, dan memaksa kita untuk lebih fokus pada cara bagaimana mengubah negara berhubungan satu sama lain, dan memiliki agenda menciptakan tata aturan internasional yang damai. Padahal, setiap tindakan negara, diwujudkan dalam rangka memperjuangkan *national interest* masing

masing, dan karenanya setiap negara akan memiliki perspektif berbeda beda mengenai orientasi kepentingan nasionalnya.

Dalam konsep *offensive realist*, negara membutuhkan kekuatan, tidak hanya untuk menjaga posisi demi terciptanya *balance of power*, melainkan untuk menjadi sekuat mungkin. Dalam sebuah sistem, dimana tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara, menjadi masuk akal bagi tiap negara untuk memiliki power agar terjaga dari serangan negara lain. Karenanya, negara negara normal, baik dengan rejim pemerintah demokratik ataupun otoriter, akan berperilaku selalu sama; mencari dan membangun power sebesar besarnya.

Untuk memperbesar kekuatan, negara dapat memilih strategi aliansi yang menjanjikan beberapa keuntungan: biaya yang dikeluarkan untuk membangun elemen militer dapat ditekan, karena bergabung dalam aliansi negara negara kuat berarti memultiplikasi kemampuan pertahanan; selain juga menjanjikan keuntungan ekonomi. Aliansi terbagi ke dalam dua jenis: *Balancing* ketika bergabung dengan negara-negara lain sebagai oposisi terhadap sumber ancaman, dan *bandwagoning* ketika negara tersebut justru memilih bergabung dengan sumber ancaman.

Indonesia hingga saat ini terlihat kurang mengantisipasi busur busur ancaman kerjasama keamanan regional masa depan, yang diprakasai Amerika bersama negara negara aliansi utamanya di kawasan seperti Jepang, Australia dan India, yang dipastikan akan melampaui selat-selat strategis Indonesia, selain selat Tsushima, Tsugaru, Osumi, dan La Perouse di perairan Asia Timur. Ini terkait erat dengan usulan "*Expanded Asia*" yang mengintegrasikan Asia Timur dan Selatan, dengan 2 samudera sebagai penghubungnya.

Kiranya, kerjasama keamanan yang lebih luas dalam aspek maritim serta udara yang dapat memberikan dampak magnitudinal pada keseimbangan regional dapat ditawarkan Indonesia. Dengan mendalami karakterisasi dan hubungan Indonesia, ASEAN dan China sudah waktunya dibawa pada suatu tingkatan yang lebih nyaman, dinamis, dan berpandangan lebih jauh kedepan. ASEAN China terbukti merupakan FTA terbesar ketiga didunia setelah EU dan NAFTA, GDP kumulatif mencapai sekitar 5, 8 trilyun dollar dan melibatkan 1,9 milyar penduduknya. Bersama China juga telah tersepakati *ASEAN-China Maritime Transport*

Agreement, ASEAN-China Aviation Cooperation Framework dan ASEAN China Regional Air Services Agreement, kerjasama terkait tariff reduction, non-tariff barriers, services trade and investment.

Jika hal ini dapat segera dicanangkan maka Indonesia dapat mengambil peran lebih signifikan dalam hubungannya dengan negara negara ASEAN serta China, utamanya dapat lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan LCS dengan mengedepankan usulan yang harus didorong Indonesia untuk menjadikan kawasan LCS sebagai *Strategic Petroleum Reserves (SPR)* yang sudah pasti dapat menyelesaikan masalah ASEAN dan China dalam konteks *energy security*. Ini sangat penting, karena negara negara yang tergabung di Uni Eropa saat ini sudah memiliki kemampuan strategic petroleum reserve (SPR) total sekitar sebesar 600 juta milyar barrel ditambah kesiapan *fuel* di 2000 buah pesawat tempur Perancis yang harus dalam kondisi *ready stock* selama 55 hari didepan dibawah pengawasan (SAGESS) *Société Anonyme de Gestion des Stocks de Sécurité*.

Dari sisi kemampuan pertahanan, Indonesia sendiri akan lebih diuntungkan dalam ruang kerjasama industri pertahanan yang dapat dibangun bersama China. Dengan lebar wilayah Indonesia yang mencakup 13% besaran dunia untuk mempersenjatai dan mempertahankan diri memerlukan secara ideal setiap tahunnya, sebanyak : 1.297 item alutsista untuk TNI AD , 84 item alutista untuk TNI AL dan 88 item alutsista untuk TNI AU yang mencakup Alutsista berat seperti tank, kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, heli serbu dan angkut hingga alutsista lebih ringan. Jelas hal ini dapat dilakukan bersama sama dengan China yang selama ini hanya menyerap 3% industri pertahanan ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, jika diambil contoh dari keputusan Indonesia akan hibah 'mahal' pesawat tempur F16 dari AS Blok 25 (*ex US coast guard*) yang akan tetap rawan embargo selain juga terhitung mahal dalam hitungan pesawat hibah. Jelaslah akan lebih menguntungkan jika kita memiliki pesawat pesawat tempur yang memiliki kekuatan melebihi apa yang dimiliki tetangga di kawasan. F 16 hubah yang baru saja kita miliki sesungguhnya tetap akan menjadi pesawat tempur yang tertinggal kemampuannya dikarenakan kemampuan pesawat tempur kawasan saat ini sudah mencapai generasi 4+ dan 5 dalam blok 50/52.

Meskipun dengan F16 hibah diretrovited tersebut kita sudah berada dalam blok C/D yang sama, tetapi dikhawatirkan kemampuan pesawat tempur kita tetap akan tertinggal dalam kemampuan *visual range* terhadap *BVR (beyond visual range)* yang akan tetap jauh berbeda. BVR adalah kemampuan melampaui jarak pandang dan menembakan sasaran pada pesawat kita diluar jarak pandang hingga melampaui 45Nm, serta kemampuan untuk menghilang dari radar pesawat tempur kita dengan kemampuan pernika (perang elektronika) yang dimilikinya, sehingga penerbang tempur kita akan seperti bertempur dengan hantu yang tidak terlihat tetapi terus mampu menyerang.

Jika kita dapat merapatkan barisan dalam membangun kekuatan industri pertahanan bersama China maka sudah dipastikan kita akan lebih mumpuni menghadapi kemampuan serta kekuatan negara negara FPDA (*five power defense arrangement*) di kawasan. Bagaimanapun, FPDA sesungguhnya harus menjadi ukuran kita dalam memandang ancaman kawasan masa depan, karena posisi Indonesia yang sesungguhnya terkepung oleh *commonwealth countries* seperti Australia, Malaysia dan Singapura yang tergabung dalam kepentingan dan kekuatan yang hampir sama

JALINAN ADIZ DAN KEAMANAN KAWASAN

Penggunaan ruang dan aset udara untuk target pencapaian tujuan militer tidak dapat dilepaskan dari kondisi *Expanded Asia by Maritime Way* ini. Penguasaan atas ruang udara terkait pada kewenangan untuk menetapkan ADIZ (*Air Defence Identification Zone*) hingga saat ini tidak diatur oleh lembaga internasional. Dasar penerapan ADIZ adalah terjaminnya hak suatu negara untuk menciptakan prakondisi bagi setiap pergerakan udara sehingga penetapan atas ADIZ oleh suatu Negara dapat dilakukan secara unilateral. Dengan batas ADIZ yang ditetapkan, pesawat apapun yang mendekati sebuah wilayah udara nasional dapat diminta untuk mengidentifikasikan diri.

ADIZ mencantumkan wilayah udara atas daratan dan lautan di mana identifikasi, lokasi, dan kontrol akan pergerakan pesawat diperlukan bagi kepentingan keamanan nasional.

Beberapa negara malah menetapkan “*extended ADIZ zone*” yang melampaui wilayah udara negara lain untuk memberikan lebih banyak waktu untuk memantau dan menindak pesawat asing berawak atau tidak, yang ditengarai memiliki potensi berbahaya.

ADIZ pertama kali ditetapkan AS setelah Perang Dunia II. Diikuti beberapa negara al. Kanada, India, Jepang, Pakistan, Norwegia, Inggris, RRC, Korea Selatan, dan ROC. Umumnya, zona ADIZ mencakup wilayah tak terbantahkan atas kedaulatan suatu negara dan tidak tumpang tindih. Karena umumnya ditetapkan secara unilateral, terjadi beragam model penerapan pada aplikasinya. Misalnya, AS tidak pernah mengakui hak negara pesisir untuk menerapkan prosedur ADIZ bagi pesawat asing untuk memasuki wilayah udara nasional.

Jepang adalah satu-satunya negara yang menerapkan ekspansi atas ADIZnya (1972 dan 2010). Korea Selatan baru memperluas zona identifikasi wilayah udara nasionalnya hingga mencapai 666.480 km² menyikapi eskalasi terkait China ADIZ (CADIZ) di akhir 2013. Selain menetapkan ADIZ nya di Laut China Timur, secara tegas China mewajibkan semua pesawat sipil dan non sipil untuk mengidentifikasi diri ketika mendekati zona CADIZ. Kemhan China bahkan menetapkan penerapan "langkah-langkah darurat defensif" oleh AU PLA untuk pesawat yang tidak mau memberikan identifikasinya (Bitzinger, 2013).

Sesungguhnya, langkah nyata China akan penerapan ADIZ dan aturan mainnya merupakan reaksi atas aksi kebijakan AS di kawasan dengan “*US Strategic Pacific*” yang merupakan elemen kunci evolusi kekuatan-militer dimana akan membawa perubahan signifikan terhadap aliansi US di kawasan.

Pemerintah China secara strategis menetapkan *China Air Defense Identification Zone* (CADIZ) untuk dapat mengantisipasi beberapa kemampuan baru terkait dengan teknologi terkini militer AS, al. pesawat tempur F-35, Sistem Tempur Aegis serta pesawat surveillance MQ-4C TRITON yang memiliki kemampuan pemindaian 360 derajat dan memiliki System Identifikasi Otomatis yang jelas akan menjadi senjata mata mata utama tak berawak. IMQ-C4 akan mulai beroperasi di 2015 dengan 5 basis operasi untuk mengawasi Laut China Selatan, Laut China Timur dan Korea Utara, dari ketinggian 60.000 kaki selama 24 jam non stop. Australia yang menjadi aliansi utama AS dikawasan sudah sejak lama juga mengoperasikan

satelit stasiun pelacakan dikenal sebagai Fasilitas *Joint Defence Space Research/Pine Gap*. Satelit ini menjadi kontributor kunci untuk jaringan global *surveillance* ECHELON.

DEMARKASI ADIZ INDONESIA DAN SIKAP INDONESIA

Pemerintah Indonesia menjadi sorotan tersendiri dalam ‘diam’ nya menanggapi masalah klaim China atas ADIZ di Laut China Timur. Sebenarnya, momentum ini dapat digunakan oleh Presiden Indonesia terpilih 2014 – 2019 untuk menetapkan ADIZ Indonesia segera secara unilateral agar mampu melegitimasi ulang kepemimpinan Indonesia dalam mengantisipasi dan berperan aktif dalam konstelasi Arc of Instability kawasan. Mengapa? :

Pertama, ADIZ dapat menjadi faktor karakteristik dan psikologis, karena seorang pemimpin hebat harus mampu berorientasi pada kebijakan luar negeri untuk menunjukkan kemampuannya berperan di luar masalah *domestic* negara .

Kedua, ADIZ dapat menjadi cara meningkatkan nasionalisme

Ketiga, ADIZ dapat dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam memperluas proyeksi kekuatan menghadapi kebijakan ‘*Rebalancing AS*’ yang sesungguhnya telah mengundang reaksi ‘*Imbalancing*’ kawasan.

China Air Defense Identification Zone (CADIZ) dapat merupakan bagian dari strategi China untuk dapat menerapkan *anti-access and area-denial* jauh dari garis pantai China. AS dipastikan akan terseret dalam konflik atas ADIZ, dimana bobot kredibilitas aliansi AS untuk menjaga stabilitas kawasan akan diuji. Misalnya, seberapa jauh AS akan berpihak pada Jepang atau Taiwan dalam sengketa militer, serta bagaimana memainkan *One China Policy* atas Taiwan yang menjadi *peace maker* utama di konflik Laut China Timur atas inisiatif Presiden Taiwan, Ma Ying Jeau (2012). Kekhawatiran yang mengemuka bahwa CADIZ juga akan diterapkan di Laut Cina Selatan, dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia atas ruang udara nasionalnya sendiri yang terabaikan.

“Claiming what is ours and defending what is ours” seharusnya menjadi semangat Indonesia dalam mengantisipasi masalah akan ruang udara selain wilayah perairannya. Langkah inisiasi unilateral DIZ harus didorong oleh kepercayaan diri Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional atas pengelolaan, pemanfaatan, pengamanan atas ruang udara. Pemimpin Indonesia perlu meniru kepercayaan diri Jepang dengan ADIZ nya yang tumpang tindih dengan Taiwan.

ADIZ antara Taiwan dan Jepang membentang membagi wilayah udara di atas Pulau Yonaguni dan menjadikan daerah Timur masuk ke wilayah Jepang dan daerah Barat masuk ke wilayah ke Taiwan. ADIZ Jepang telah memperluas areanya hingga 12 mil laut dari baseline. Terkait klaim sepihak itu, PM Jepang Yukio Hatoyama dengan tegas mengatakan norma-norma internasional atas demarkasi ADIZ terletak pada kebijaksanaan tiap negara, sehingga wajar bagi Jepang untuk tidak meminta persetujuan Taiwan akan penetapan zona ADIZ nya. Hatoyama dapat dijadikan contoh kriteria pemimpin yang diperlukan oleh negara supra- strategis seperti Indonesia.

IDENTIFICATION MARITIME ZONE (IMZ)

Sejak Desember 2004, Australia telah mengumumkan pembentukan AMIZ (*Australia Identification Maritime Zone*) sepanjang 1000 mil laut dari garis pantai terluar Australia dan mengcover hampir 1/3 wilayah Indonesia. Sejak Maret 2005, semua perlintasan kapal yang melintasi zona tersebut diminta untuk memberikan rincian lengkap tentang kargo, kru, lokasi, kecepatan, dan pelabuhan tujuannya. Australia mengintegrasikan unsur-unsur militer Australia untuk menegakkan AMIZ yang diaplikasikannya secara sepihak. Padahal dengan penerapan AMIZ Australia telah melanggar kedaulatan tidak kurang dari enam negara, termasuk Indonesia.

Professor Don Rothwell (Sydney University) menyatakan AMIZ merupakan sebuah pelanggaran besar terhadap kebebasan bernavigasi di laut lepas dan kebebasan dari negara tetangga Australia untuk mengontrol wilayah perairannya sendiri. Langkah Australia akan AMIZ

ini, dipastikan akan diikuti oleh China yang pada tahun 2020 dan 2050 akan menjadi negara dengan kemampuan *Green* dan *Blue Water Navy*.

Jika kompetisi ini terjadi dan diikuti oleh negara sekutu AS lainnya, kedaulatan Indonesia dipastikan akan semakin terjepit baik di ruang udara maupun wilayah perairannya. Langkah tegas dan *confident* Indonesia untuk menetapkan ADIZ dan *Indonesia Maritime Identification Zone (IMIZ)* secara unilateral menjadi PR Presiden mendatang dan TNI dalam menghadapi tantangan, resiko dan ancaman dari konstalasi politik keamanan kawasan.

Maka pertanyaan dalam konteks Indonesia menghadapi perseteruan kedua gajah ini, adalah bagaimana strategi kebijakan politik luar negeri akan berimplikasi pada keamanan Indonesia dimasa mendatang, khususnya dalam penanganan *spill over* dari AS bersama aliansinya, untuk menghadapi kekuatan China dengan *Blue Water Navy* nya di 2050. Pilihan apa yang dimiliki Indonesia jika ingin tetap menyatakan posisi netralitasnya?

Indonesia dapat secara agresif terus menerus menyatakan posisi non bloknya dan artinya menegakkan Manual San Remo 1994 tentang konflik bersenjata di laut yang melarang aktifitas perseteruan bersenjata di perairan negara netral. Tetapi jelaslah hal ini akan membawa kita ke implikasi lain akan permasalahan dan kesulitan yang mencakup kapasitas dan sumber daya militer Indonesia yang akan terkikis untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas dari kapal kapal dan pesawat yang bertindak agresif di dalam wilayah perairan dan udara kedaulatan kita dengan memahami dan kemampuan mengantisipasi bahwa jika skenario terburuk yang akan terjadi dimana sebuah insiden terjadi diantara kelompok yang berkonfrontasi dan tidak ada yang mau menyatakan tanggung jawabnya, maka dipastikan seluruh dunia akan menuding Jakarta akan ketidak sanggupannya dalam menegakan posisi netralitasnya.

Indonesia juga dapat melakukan pilihan non blok - *dalam arti yang sesungguhnya* – yaitu untuk mampu merangkul dan memasuki orbit maritim Beijing dimana Indonesia dapat meminta China untuk terus mendukung dan mengembangkan kapasitas armada dirgantara dan kelautan Indonesia khususnya dalam hal pengideraan maritim, persenjataan, pembangunan kapal dan pengembangan kemampuan Oceanography, dan hal ini dilakukan dengan sekaligus bersama sama merangkul AS dan membina hubungan baik dengan

aliansi AS untuk dapat mendukung aktivitas ISR, aktivitas penerbangan dan pelayaran di seluruh wilayah perairan dan udara nasional.

Dengan memiliki strategi dan kemampuan “diplomasi pertahanan tingkat tinggi” ini maka Indonesia dapat meredam resiko akan China dan AS beserta aliansinya untuk dapat melakukan aktivitas ISR secara rahasia dan tidak terawasi di wilayah kedaulatan kita sekaligus akan membuat kita mampu untuk mengontrol dan meredam kedua gajah berikut aliansinya ini dalam melakukan segala kemungkinan sabotase diseluruh wilayah perairan dan udara Indonesia termasuk chokepoints strategisnya.

Jelaslah kemampuan ini akan dapat mendorong terwujudnya kekuatan Armada Laut dan Udara Indonesia yang mampu untuk memiliki kontrol efektif pada seluruh wilayah maritim dan dirgantara Indonesia, menetralsir semua ancaman dan resiko, menjamin keamanan maritim dan dirgantara kawasan dan juga menjaga serta memelihara lingkungan negara yang aman damai tentram raharja demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

